



DIMENSI EKONOMI DALAM IMPLIKASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dini Vientiany

dini1100000167@uinsu.ac.id

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fahriza Alyanisa

fahrizaalyanisa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Shafa Sizli Kania

Shafasizlik@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Siti Zuhairoh Ritonga

sitizuhairoh78@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: *dini1100000167@uinsu.ac.id*

Abstract *This research aims to find out more about the economic dimensions of tax implications in Indonesia. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through document analysis to explore the economic dimensions of taxation in Indonesia. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, this research shows that the taxation system in Indonesia has an important role in encouraging economic growth and improving people's welfare. The increase in tax revenues in 2021, especially from the Income Tax (PPh) and Customs Tax sectors, indicates economic recovery after the COVID-19 pandemic. However, a complex tax system and high ETR can hinder investment and business performance.*

Keywords: *Economy, Tax implications, Indonesia*

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen untuk mendalami dimensi ekonomi perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2021, terutama dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bea Cukai, mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun, sistem perpajakan yang kompleks dan ETR yang tinggi dapat menghambat investasi dan kinerja bisnis.*

Kata Kunci: *Ekonomi, Implikasi perpajakan, Indonesia*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu instrumen penting bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk membiayai pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai perkembangan dan reformasi, dengan tujuan untuk mencapai sistem perpajakan yang adil, efisien, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang

dihadapi dalam sistem perpajakan di Indonesia, salah satunya terkait dengan dimensi ekonomi dalam implikasinya. Dimensi ekonomi ini meliputi berbagai aspek, seperti efektivitas pemungutan pajak, alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi (Simanjutak & Mukhlis, 2022).

Persoalan terkait dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk memahami dan menganalisis dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di Indonesia. Perpajakan adalah salah satu unsur penting dalam sistem ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perpajakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perpajakan juga dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pengeluaran dan investasi (Malik & Saputra, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, tetapi masih terdapat beberapa isu yang perlu diatasi. Salah satu isu tersebut adalah perpajakan yang masih menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang paling signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti kesenjangan antara pendapatan negara dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perpajakan memiliki implikasi yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Suharso dan Wibowo (2019) menunjukkan bahwa perpajakan dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan, sehingga dapat berdampak pada kinerja bisnis. Penelitian lain oleh Kusumawati dan Suharto (2020) menunjukkan bahwa perpajakan dapat mempengaruhi investasi, terutama dalam sektor industri.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sistem perpajakan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, efektivitas pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi

berbagai tantangan, termasuk tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan adanya praktik penghindaran pajak.

Selain itu, alokasi sumber daya yang dihasilkan dari pajak juga merupakan isu penting dalam sistem perpajakan. Penggunaan dana pajak yang tepat dan efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, alokasi yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam perekonomian.

Distribusi pendapatan yang merata juga menjadi salah satu tujuan utama dari sistem perpajakan. Pajak progresif, misalnya, dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada individu atau entitas dengan penghasilan lebih tinggi. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan dalam praktik, terutama dalam memastikan kepatuhan dan mengatasi resistensi dari kelompok-kelompok tertentu.

Stabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan. Peningkatan atau penurunan tarif pajak dapat berdampak pada konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu dirancang dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan terhadap ekonomi.

Reformasi perpajakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk simplifikasi proses administrasi pajak, peningkatan transparansi, dan pemberantasan korupsi dalam sistem perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai sistem perpajakan yang ideal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharso dan Wibowo (2019), ditemukan bahwa beban pajak dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja bisnis, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai jenis bisnis dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain oleh Kusumawati dan Suharto (2020) menunjukkan bahwa perpajakan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Investor cenderung mempertimbangkan beban pajak sebagai salah satu faktor dalam membuat keputusan investasi. Tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi daya tarik investasi dan menghambat aliran modal ke sektor-sektor yang membutuhkan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu dirancang sedemikian rupa untuk menarik investasi dan mendukung perkembangan industri.

Secara keseluruhan, sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa sistem perpajakan dapat berfungsi secara optimal. Penelitian dan analisis yang mendalam mengenai dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan merumuskan solusi yang efektif. Dengan demikian, perpajakan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kenyataan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitiandimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian ini, kita akan menjelajahi bagaimana perpajakan mempengaruhi kinerja bisnis dan investasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik perpajakan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori-teori Ekonomi yang Relevan

Berikut adalah pengembangan dari teori-teori ekonomi yang relevan untuk mengkaji dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di Indonesia:

Teori Alokasi Sumber Daya, Pajak memiliki peran penting dalam mengarahkan alokasi sumber daya dalam suatu perekonomian. Pajak dapat memengaruhi keputusan investasi, produksi, dan konsumsi dengan cara mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu. Misalnya, pajak yang tinggi pada barang mewah dapat mengurangi konsumsi barang-barang tersebut dan mendorong masyarakat untuk mengalokasikan pendapatannya ke sektor lain. Sebaliknya, insentif

pajak pada sektor tertentu seperti teknologi hijau dapat mendorong investasi dan inovasi di sektor tersebut, membantu peralihan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Teori Efisiensi, Penerapan pajak dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi dengan menciptakan distorsi pada pasar dan perilaku ekonomi. Pajak yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak optimal, mengurangi efisiensi pasar. Misalnya, pajak yang tinggi pada tenaga kerja dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinovasi, sementara pajak yang rendah pada modal dapat mendorong akumulasi kekayaan pada segelintir individu atau perusahaan. Oleh karena itu, desain kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi secara keseluruhan, dengan tujuan meminimalkan distorsi dan memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Teori Keadilan, Pajak juga memiliki peran penting dalam mencapai keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu masyarakat. Pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memindahkan sebagian kekayaan dari kelompok berpendapatan tinggi ke kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, kebijakan pajak dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, perpajakan dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Secara keseluruhan, penerapan teori-teori ekonomi ini dalam konteks perpajakan di Indonesia dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, efisien, dan adil (Anugrah & Fitriandi, 2022).

2. Implikasi Ekonomi Penerapan Pajak di Indonesia

Berikut adalah pengembangan dari implikasi ekonomi penerapan pajak di Indonesia:

Dampak pada Penerimaan Negara, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan vital untuk membiayai berbagai program pemerintah di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, yang sangat diperlukan untuk

meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan penerimaan pajak yang memadai, pemerintah dapat menjalankan berbagai program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi, Pajak dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara. Di satu sisi, pajak yang tinggi dapat mengurangi disposable income masyarakat dan mengurangi konsumsi, yang pada gilirannya dapat menekan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pajak yang terlalu rendah dapat mengurangi kapasitas pemerintah untuk melakukan investasi publik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam kebijakan perpajakan agar dapat mendorong investasi dan konsumsi tanpa mengurangi pendapatan yang dibutuhkan untuk pembangunan (Simanjutak & Mukhlis, 2022).

Dampak pada Distribusi Pendapatan dan Kekayaan, Penerapan pajak juga memiliki implikasi penting terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem perpajakan yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, pemerintah dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Pajak yang dipungut dari kelompok berpendapatan tinggi dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi kelompok berpendapatan rendah, seperti subsidi pangan, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, pajak dapat berfungsi sebagai alat redistribusi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dampak pada Efisiensi Ekonomi, Pajak juga dapat memengaruhi efisiensi ekonomi dengan menciptakan distorsi pada pasar dan perilaku ekonomi. Pajak yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak optimal dan mengurangi efisiensi pasar. Misalnya, pajak yang terlalu tinggi pada tenaga kerja dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinovasi, sementara pajak yang rendah pada modal dapat mendorong akumulasi kekayaan yang tidak produktif. Oleh karena itu, desain kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap efisiensi

ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan pajak yang baik harus meminimalkan distorsi pasar dan mendorong alokasi sumber daya yang optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan pajak di Indonesia memiliki berbagai implikasi ekonomi yang kompleks dan saling terkait. Kebijakan pajak yang efektif harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan, serta efisiensi ekonomi. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya adil dan efisien tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Mukhlis, 2019).

3. Tantangan dan Isu-isu dalam Dimensi Ekonomi Perpajakan di Indonesia

Salah satu tantangan utama dalam perpajakan di Indonesia adalah menciptakan struktur pajak yang progresif. Struktur pajak yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, sangat penting untuk mencapai keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan menerapkan pajak yang lebih tinggi pada kelompok berpendapatan tinggi, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Namun, ini juga memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menghambat semangat kerja dan investasi dari kelompok yang dikenakan pajak lebih tinggi. Kebijakan pajak progresif harus dirancang sedemikian rupa agar tetap menarik bagi investor dan tidak mengurangi insentif untuk bekerja keras.

Efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak adalah aspek kritis yang menentukan seberapa baik sistem perpajakan berfungsi. Tantangan di Indonesia termasuk dalam hal administrasi pajak yang sering kali masih menghadapi kendala birokrasi dan teknologi. Pemungutan pajak yang efisien dan efektif tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi juga mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu meningkatkan sistem administrasi perpajakan, memanfaatkan teknologi informasi, dan memberikan edukasi serta layanan yang baik kepada wajib pajak. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Penghindaran dan penyalahgunaan pajak merupakan masalah serius yang dapat merugikan penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan. Beberapa perusahaan dan individu mungkin memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka secara tidak sah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait perpajakan. Penggunaan teknologi seperti analitik data dan audit berbasis risiko dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak. Selain itu, transparansi dan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan juga penting untuk menekan praktik penghindaran pajak lintas batas.

Harmonisasi dan koordinasi kebijakan pajak antar daerah dan dengan negara lain merupakan isu penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Perbedaan kebijakan pajak antar daerah dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan menghambat mobilitas barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan kebijakan pajak di tingkat nasional dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakkonsistenan. Di tingkat internasional, Indonesia juga perlu berpartisipasi dalam kerjasama perpajakan global untuk menghindari praktik penghindaran pajak lintas negara dan memastikan bahwa pajak dipungut dengan adil di semua yurisdiksi.

Secara keseluruhan, tantangan dan isu-isu dalam dimensi ekonomi perpajakan di Indonesia memerlukan perhatian dan tindakan yang komprehensif dari pemerintah. Dengan mengatasi tantangan ini, sistem perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan efektif, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat(Wahyu, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen untuk mendalami dimensi ekonomi perpajakan di Indonesia. Langkah pertama adalah menentukan jenis dokumen seperti undang-undang perpajakan, laporan keuangan pemerintah, data statistik perpajakan, serta dokumen terkait kinerja bisnis dan investasi, yang akan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti instansi pemerintah (DJP dan BPS), lembaga penelitian, perpustakaan, arsip, dan situs web resmi. Setelah mengumpulkan dokumen yang relevan dan memastikan keaslian

serta kredibilitasnya, proses dilanjutkan dengan menganalisis isi dokumen secara menyeluruh, mencatat poin-poin penting, mengidentifikasi tema dan konsep yang relevan, serta menarik kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan jelas untuk memberikan wawasan mendalam tentang perpajakan di Indonesia serta mendukung pengembangan kebijakan yang efektif dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021

Kategori	Nilai (Rp Miliar)	Analisis
Pendapatan Pajak	1.420.778,9	Penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 11,8% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perpajakan mulai pulih setelah terdampak pandemi COVID-19.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	201.077,2	Penerimaan negara bukan pajak mengalami penurunan sebesar 2,3% dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari sektor sumber daya alam.
Belanja Negara	1.847.855,1	Belanja negara mengalami peningkatan sebesar 2,3% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Defisit Anggaran	427.076,2	Defisit anggaran mengalami penurunan sebesar 14,1% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin disiplin dalam mengelola keuangan negara.

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>

Berdasarkan Tabel 1, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat sebesar 11,8% dibandingkan tahun 2020, mengindikasikan pemulihan kinerja perpajakan pasca pandemi COVID-19. Namun, penerimaan negara bukan pajak menurun sebesar 2,3% akibat penurunan penerimaan dari sektor sumber daya alam. Di sisi lain, belanja negara naik sebesar 2,3%

dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan peningkatan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, defisit anggaran berkurang sebesar 14,1%, menunjukkan disiplin pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Tabel 2: Data Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2021

Jenis Pajak	Penerimaan (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)
Pajak Penghasilan (PPh)	829.334,2	14,2
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	527.111,3	10,3
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.006,1	5,8
Pajak Bea Cukai	41.327,3	12,9

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>

Tabel 2 menunjukkan data statistik penerimaan pajak tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: Pajak Penghasilan (PPh) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,2%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam pendapatan individu dan perusahaan, mungkin akibat pemulihan ekonomi dan aktivitas bisnis yang meningkat setelah pandemi COVID-19. Pajak Bea Cukai mencatat pertumbuhan sebesar 12,9%, yang dapat diartikan sebagai peningkatan dalam perdagangan internasional dan kepatuhan terhadap peraturan bea cukai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh sebesar 10,3%, yang menunjukkan peningkatan konsumsi dan penjualan barang mewah, sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami pertumbuhan paling rendah di antara jenis pajak lainnya, yaitu sebesar 5,8%, yang mungkin mencerminkan stabilitas dalam sektor properti dan penilaian aset tetap. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren positif dalam penerimaan pajak di berbagai sektor, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang lebih luas dan beragam setelah dampak pandemi. Peningkatan penerimaan pajak ini juga dapat diartikan sebagai hasil dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memperluas basis pajak. Keberhasilan ini penting untuk mendukung pengeluaran publik yang lebih besar dalam bidang-bidang kritis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta untuk menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tabel 3: Dampak Perpajakan terhadap Kinerja Bisnis di Indonesia

Indikator	Dampak	Analisis
Tingkat Efektif Pajak (ETR)	Tinggi	ETR yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas perusahaan dan menghambat investasi.
Kepastian Hukum Perpajakan	Rendah	Kepastian hukum perpajakan yang rendah dapat menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha dan menghambat investasi.
Kompleksitas Sistem Perpajakan	Tinggi	Kompleksitas sistem perpajakan dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan dan menghambat investasi.

Sumber: <https://www.pajakku.com>

Tabel 3 menyoroti beberapa dampak perpajakan terhadap kinerja bisnis di Indonesia. Tingkat Efektif Pajak (ETR) yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan menjadi hambatan bagi investasi. Ini terjadi karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih yang tersedia untuk ditanamkan kembali dalam bisnis atau untuk dividen kepada pemegang saham. Selain itu, rendahnya kepastian hukum perpajakan dapat menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan investor dan menghambat keputusan investasi jangka panjang. Kompleksitas sistem perpajakan yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan, baik dalam hal administrasi maupun konsultasi dengan ahli perpajakan, yang berpotensi mengurangi efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan iklim investasi, diperlukan reformasi pajak yang mempertimbangkan pengurangan ETR yang wajar, peningkatan kepastian hukum perpajakan, dan penyederhanaan sistem perpajakan untuk mengurangi beban administratif dan biaya kepatuhan bagi pelaku bisnis di Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan, dimensi ekonomi memainkan peran krusial dalam memahami implikasi perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan, dengan segala kompleksitasnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk kinerja bisnis, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak tahun 2021, terutama dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bea Cukai, menunjukkan sinyal positif pemulihan ekonomi

pasca pandemi COVID-19. Ini mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis, perdagangan internasional, dan daya beli masyarakat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Peningkatan penerimaan pajak ini juga menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor krusial lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun, di sisi lain, sistem perpajakan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja bisnis di Indonesia. Tingkat Efektif Pajak (ETR) yang tinggi, rendahnya kepastian hukum perpajakan, dan kompleksitas sistem perpajakan dapat menjadi hambatan serius bagi investasi dan pertumbuhan usaha. Tingginya ETR dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan menghambat kemampuan mereka untuk reinvestasi atau distribusi keuntungan. Ketidakpastian hukum perpajakan juga dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan di kalangan pelaku bisnis, menghambat keputusan investasi jangka panjang. Selain itu, kompleksitas dalam administrasi pajak dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan, mengurangi efisiensi operasional, dan mengurangi daya saing. Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan yang menyederhanakan sistem, meningkatkan kepastian hukum, dan mengurangi beban pajak yang berlebihan bagi pelaku bisnis di Indonesia. Langkah-langkah ini akan membantu mendorong sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2021, terutama dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bea Cukai, mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun, sistem perpajakan yang kompleks dan ETR yang tinggi dapat menghambat investasi dan kinerja bisnis. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang menyederhanakan sistem, meningkatkan kepastian hukum, dan mengurangi beban pajak perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan

mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- (Fitriani, 2020)Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Fitriani, I. N. (2020). Pelatihan Pembuatan Deodoran Dari Bahan Alami Dan Perintisan Sebagai Home Industri. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.20961/semar.v7i1.24490>
- Malik, A., & Saputra, A. H. (2023). Penentuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital Di Indonesia Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (Ahp). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(2), 193–211. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5241>
- Mukhlis, I. (2019). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Finansia*, 13.
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. (2022). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (p. 226).
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2, 1–11.